

## **TUGAS KELOMPOK PORTOFOLIO**

### **KELOMPOK 2**

**Disusun Oleh:**

- 1. Igha Mawardhani      2313031043**
- 2. Intan Romala Sari    2313031051**

**Mata Kuliah                : Akuntansi Sektor Publik**

**Dosen Pengampu            : Dr. Pujiati, M.Pd  
                                  Mega Metalia, SE, M.Si., MSAk., Ak  
                                  Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.**

---

---

### **Analisis Artikel 1 Media Masa Online**

#### **“Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik”**

Dalam artikel ini menjelaskan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor public merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sektor publik untuk kepentingan eksternal. Kerangka konseptual akuntansi sektor public merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Tujuan dan Peranan Konseptual Akuntansi Sektor Publik

- a. Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam tugasnya.
- b. Penyusun laporan keuangan untuk memahami praktik akuntansi menurut prinsip akuntansi yang secara lazim dan standar akuntansi keuangan sektor public.
- c. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.
- d. Para pemakai laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan sektor publik. Peranan Pelaporan Keuangan yaitu laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi.

Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan, Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana dimuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Sumber:

[https://www.kompasiana.com/ribka\\_nurfa1ah/63b026764addee64b30b5062/kerangka-konseptual-akuntansi-sektor-publik](https://www.kompasiana.com/ribka_nurfa1ah/63b026764addee64b30b5062/kerangka-konseptual-akuntansi-sektor-publik)

### **Analisis Artikel 2 Media Massa Online**

#### **ASN Cakap Digital Pacu Optimalisasi Layanan Publik**

Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kompetensi literasi digital akan menghasilkan pelayanan public yang optimal. Dalam menyongsong era digital, maka kompetensi yang dibutuhkan oleh ASN pada dasarnya adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Untuk itu perlu menggalakan budaya literasi teknologi yang mencakup literasi digital dan literasi data. Seperti Kemendikbudristek yang telah memanfaatkan TIK dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Termasuk penggunaan media sosial seperti Facebook, Youtube, Instagram, hingga Twitter untuk menyampaikan informasi baik kepada lingkup internal maupun eksternal lembaga.

Sumber: <https://aptika.kominfo.go.id/2022/11/asn-cakap-digital-pacu-optimalisasi-layanan-publik/>

### **Analisis Artikel 3 Media Massa Online**

#### **Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud**

Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik secara partial maupun secara bersama-sama. Sedangkan secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud baik secara partial maupun secara bersama-sama. Oleh karena itu perlu pengkajian atas pelaksanaan praktis dari Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

sumber :<https://media.neliti.com/media/publications/71982-ID-pengaruh-penerapan-akuntansi-sektor-publ.pdf>

### **Analisis Jurnal Nasional 1**

1. Judul Jurnal : Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi
2. Tahun Terbit : 2018
3. Nama Penulis : Elvira Zeyn
4. Tanggal di Akses : 02 Desember 2023

Terwujudnya good governance (tata kelola yang baik) sangat diperlukan terutama di instansi pemerintah. Upaya ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Penetapan UU No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas public yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah (Halim, 2001). Selanjutnya, Undang-Undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Berdasarkan hasil penelitian, komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Keller, 1997 dalam Darma, 2004). Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan (Nouri dan Parker, 1996; McClurg, 1999; Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002; Darma, 2004). Selanjutnya hasil penelitian Herlin (2010) menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi melalui akuntabilitas publik. Sedangkan dari penelitian lainnya menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara variabel komitmen organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur pemrintah daerah (Bambang, 2006). Komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik pada tingkat yang cukup (sedang). Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin baik komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik.

Sumber :

Zeyn. Elvira. (2018). “Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi”. Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat.

## **Analisis Jurnal Nasional 2**

Judul Jurnal : “Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Sistem Keuangan Pemerintahan Desa”

Penulis : Erika Rahma Setiyani, Risky Nurfadila

Volume : 1

No : 2

Tahun Terbit : 2021

Link Jurnal : <https://journal.unita.ac.id/index.php/jamanta/article/view/481>

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana implementasi Akuntansi Sektor Publik di dalam sistem keuangan pemerintahan desa yang dimana penelitian

ini mengambil salah satu desa yaitu Desa Gendingan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa diatur pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Menteri Dalam Negeri, No.113 Tahun 2014). Selain itu pedoman umum dan rinci mengenai alokasi dana desa yang memaparkan tentang akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan laporan pertanggungjawaban adalah Perbup Kabupaten Tulungagung (No. 89 Tahun 2020) tahun anggaran 2021. Dana perimbangan sebagai penerimaan Pemerintah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus merupakan sumber alokasi dana dalam APBD. Penggunaan alokasi dana desa mengacu pada RPJM Desa dan Renja Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam jurnal ini, Di desa Gendingan, transaksi telah dijurnal, dan bendahara telah menggunakan sistem pembukuan yang disebut Siskeudes. Dengan demikian, bukan hanya memakai kwitansi dan catatan dalam menilai kas masuk dan di desa, bendahara juga wajib membuat buku kas umum dan buku kas pembantu melalui system akuntansi desa yang telah diterapkan.

Dari penelitian kami disimpulkan bahwa mekanisme penyusunan APBDesa di Desa Gendingan tahun 2021 sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penerapan akuntansi sektor publik yang telah dilakukan oleh Bendahara Desa Gendingan sudah memenuhi kriteria. maka, untuk menunjukkan bahwa dalam laporan pertanggungjawaban dana desa ini menunjukkan adanya pengelolaan dana APBDesa secara teratur. Sistem pengelolaan secara tepat dapat menjadikan desa mandiri, dan akhirnya mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Sumber :

Setiyani, E. R., & Nurfadila, R. (2021). Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Sistem Keuangan Pemerintahan Desa. Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita, 72-82

### **Analisis Jurnal Nasional 3**

Judul jurnal : Pengaruh profesionalisme dan keterampilan terhadap kepuasan kerja serta dampaknya terhadap kinerja pegawai badan perencanaan pembangunan daerah sumatera utara

Penulis :Gerry Richad, Bernard Tawel dan Janje Sepang

Tahun : 2018

Link Jurnal : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/21298>

Suatu organisasi dapat dikatakan sebagai organisasi yang berhasil apabila tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya. Kinerja Pegawai ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya profesionalisme, keterampilan dan kepuasaan Kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profesionalisme dan keterampilan terhadap kepuasaan kerja serta dampaknya terhadap kinerja pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 40 responden pegawai. Data penelitian ini diperoleh dari metode kuantitatif data primer (kuesioner), dan studi kepustakaan sesuai tujuan penelitian. Teknik analisis menggunakan uji validitas, uji realibilitas, analisis jalur dan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme dan keterampilan berpengaruh signifikan terhadap kepuasaan kerja dan profesionalisme, keterampilan dan kepuasaan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dan secara tidak langsung profesionalisme dan keterampilan melalui kepuasaan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan agar terus mengevaluasi dan memperhatikan profesionalisme, keterampilan dan kepuasaan kerja untuk dapat meningkatkan terus kinerja pegawai

### **Analisis Jurnal Internasional 1**

Nama Jurnal : Jurnal *Accounting*

Judul Artikel : *Key Success Factors in Implementing International Public Sector Accounting Standards*

Nama Penulis : Ayman Ahmad Abu Haija, Alaa Mohammad Al Qudah, Laith Abdallah Aryan, Mohammad Jamal Azzam.

Volume 7

Halaman : 239-248

Tahun Terbit: 2021

Gagasan dalam jurnal ini adalah menjelaskan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam menerapkan standar akuntansi sektor public internasional. Karena dalam permasalahannya, penerapan IPSAS (standar akuntansi sektor public internasional) berpotensi menjadi hambatan yang dihadapi oleh pemerintah karena mulai beralih ke basis akrual penuh. Terdapat beberapa faktor yang diteliti, yaitu pelatihan, legislasi lokal, infrastruktur, dukungan eksternal, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Faktor yang paling tertinggi menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan IPSAS adalah peraturan daerah dan infrastruktur, sedangkan faktor yang paling bawah adalah pelatihan staf.

Dilihat dari hasil kesimpulannya bahwa Faktor yang paling tertinggi menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan IPSAS adalah peraturan daerah dan infrastruktur, sedangkan faktor yang paling bawah adalah pelatihan staf. Kami rasa, pelatihan staf juga tidak kalah penting dengan faktor lainnya. Jika staf tidak terlatih, maka laporan keuangan yang akan dihasilkan pasti masih belum sesuai dengan IPSAS karena minimnya keahlian dan pengetahuan staf.

## **Analisis Jurnal Internasional 2**

Judul Jurnal : “*The Fate Of Accounting For Public Governance Development*”

Penulis : Giuseppe Grossi, Daniela Argento

Volume : 35

No : 9

Tahun Terbit : 2022

Link Jurnal :

<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-11-2020-5001/full/pdf?title=the-fate-of-accounting-for-public-governance-development>

Penelitian ini melakukan tinjauan literatur tradisional berdasarkan studi terpilih di bidang akuntansi, administrasi publik dan manajemen. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana beragam bentuk tata kelola publik memengaruhi nasib akuntansi sektor publik, termasuk akuntabilitas, pengukuran kinerja, penganggaran, dan praktik pelaporan.

Terinspirasi oleh ideologi neo-liberal, banyak pemerintah menggunakan kebijakan manajemen publik (NPM) baru yang mengubah sektor publik dengan memperkenalkan prinsip manajerial tipe bisnis dan logika pasar yang biasanya digunakan di sektor swasta. Hal ini dimotivasi oleh kelemahan yang dirasakan dari sektor publik yang statis, tidak efisien, tidak efektif, dan tidak responsif. NPM dikaitkan dengan akuntabilitas berbasis kinerja untuk hasil (*output*) dan bentuk hierarki (vertikal) dari kontrol organisasi tunggal. Kecenderungan NPM untuk mengukur kinerja keuangan dan mengontrol penggunaan sumber daya publik yang efisien dan pelit telah diberi label akuntansi dan Masyarakat Audit.

Studi yang menganalisis perkembangan tata kelola publik dan perubahan dalam akuntansi sektor publik semakin meningkat dan dapat ditemukan dalam literatur yang berbeda, mengarah ke pemahaman yang tersebar tentang bentuk-bentuk baru pengaruh tata kelola publik pada praktik akuntansi sektor publik. Saat ini, tata kelola publik memiliki banyak segi, karena berbagai aktor dan sarana digital terlibat kurang lebih secara aktif dalam penyampaian layanan publik. Bergantung pada fokusnya, tiga bentuk tata kelola publik diidentifikasi: Tata Kelola Jaringan, Kolaboratif, dan Digital.

Penelitian ini berusaha untuk mengatasi fragmentasi ini dengan memfokuskan pada transformasi akuntansi sektor publik karena perkembangan tata kelola publik yang sedang berlangsung. Ini secara khusus bertujuan untuk menjelaskan bagaimana akuntansi sektor publik telah berubah dan berubah karena perkembangan tata kelola publik. Nasib akuntansi sektor publik Bagian ini berfokus pada implikasi dari tiga bentuk tata kelola publik untuk praktik akuntabilitas, pengukuran kinerja, penganggaran dan pelaporan.

Sumber:

Grossi, G., & Argento, D. (2022). *The Fate Of Accounting For Public Governance Development. Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 273-303.

### **Laporan Keuangan Sektor Publik**

#### **Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali (2019)**

Analisis:

Laporan keuangan ini menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aktivitas operasi, serta perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2019. Dari laporan keuangan tersebut, dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki aset sebesar Rp. 8 triliun serta liabilitas sebesar Rp. 5 triliun. Selain itu, terdapat surplus operasi sebesar Rp. 700 miliar pada tahun 2019.

Laporan keuangan ini mengikuti standar akuntansi sektor publik yang berlaku di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Sektor Publik (SASP). Pengungkapan dan pelaporan yang dilakukan juga sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selain itu, laporan keuangan tersebut juga menyajikan informasi mengenai belanja yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2019. Belanja terbagi menjadi beberapa kategori, diantaranya belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Laporan keuangan tersebut juga menyajikan informasi mengenai penerimaan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2019. Penerimaan terbagi menjadi beberapa sumber, diantaranya pajak daerah, pajak lainnya, dan retribusi daerah. Dari informasi tersebut, dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki tingkat penerimaan yang cukup tinggi pada tahun 2019.

Selain itu, laporan keuangan juga menyajikan informasi mengenai rincian biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2019. Biaya terbagi menjadi beberapa sub kategori, diantaranya biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, dan biaya lain-lain. Dari informasi tersebut, dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki tingkat biaya yang cukup tinggi pada tahun 2019.

Referensi:

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali (2019). Diakses dari <https://www.baliprov.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-provinsi-bali-tahun-2019>

Sistem **pengukuran kinerja sektor publik** adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik mengevaluasi pencapaian suatu strategi dengan menggunakan alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

**Pengukuran kinerja sektor publik** adalah suatu proses untuk menilai sejauh mana suatu organisasi sektor publik telah mencapai tujuannya dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efektif dan efisien. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pemerintah. Dimana kinerja pemerintah harus diukur dari sisi input, output, dan outcome. Tujuan pengukuran value for money untuk mengukur tingkat keekonomisan dan alokasi sumber daya, efisiensi, dalam penggunaan sumber daya dan hasil yang maksimal, serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Sistem **pengukuran kinerja sektor publik** adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik mengevaluasi pencapaian suatu strategi dengan menggunakan alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

**Pengukuran kinerja sektor publik** adalah suatu proses untuk menilai sejauh mana suatu organisasi sektor publik telah mencapai tujuannya dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efektif dan efisien. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pemerintah. Dimana kinerja pemerintah harus diukur dari sisi input, output, dan outcome. Tujuan pengukuran value for money untuk mengukur tingkat keekonomisan dan alokasi sumber daya, efisiensi, dalam penggunaan sumber daya dan hasil yang maksimal, serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Sistem **pengukuran kinerja sektor publik** adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik mengevaluasi pencapaian suatu strategi dengan menggunakan alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

**Pengukuran kinerja sektor publik** adalah suatu proses untuk menilai sejauh mana suatu organisasi sektor publik telah mencapai tujuannya dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama

organisasi dan indikator kinerja kunci. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efektif dan efisien. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pemerintah. Dimana kinerja pemerintah harus diukur dari sisi input, output, dan outcome. Tujuan pengukuran value for money untuk mengukur tingkat keekonomisan dan alokasi sumber daya, efisiensi, dalam penggunaan sumber daya dan hasil yang maksimal, serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya.



PENERITAH PROVINSI BALI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019.  
AUDITED

URAIAN	REF CATE	TA 2020		REALISASI TA 2019	(dalam Rupiah)
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	6.092.766.638.277,00	5.718.399.699.615,49	93,85	6.645.538.871.169,59
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	3.434.785.985.000,00	3.069.474.217.923,49	89,36	4.023.156.314.194,59
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	2.989.347.879.808,48	2.607.990.396.693,00	87,24	3.465.996.393.564,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	26.452.745.700,00	18.966.859.393,00	71,70	33.841.762.964,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	177.452.629.542,00	177.395.020.194,90	99,97	171.076.247.197,42
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	241.532.729.949,52	265.121.941.642,59	109,77	254.241.800.389,17
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	2.652.272.653.277,00	2.643.157.481.688,00	99,66	2.516.498.279.035,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	2.573.470.371.277,00	2.564.155.199.688,00	99,65	2.548.061.873.035,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	79.802.282.000,00	78.802.282.000,00	100,00	68.454.406.000,00
LAUN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	5.708.000.000,00	5.708.000.004,00	100,00	5.884.278.000,00
Pendapatan Hizirah	5.1.1.3.1	5.708.000.000,00	5.708.000.004,00	100,00	5.884.278.000,00
BELANJA DAERAH	5.1.2	5.251.666.308.641,20	4.916.723.287.079,41	93,82	4.403.625.540.597,87
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	4.385.912.048.817,52	4.223.413.143.305,30	94,01	3.845.888.340.311,65
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.708.536.108.816,52	1.597.686.826.900,68	93,51	1.590.611.064.913,75
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.642.708.046.021,00	1.553.627.778.078,12	94,58	1.395.894.560.327,09
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	5.000.000.000,00	4.999.000.000,00	98,72	9.903.528.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	1.025.447.891.960,00	963.181.053.126,50	93,95	1.040.184.587.070,81
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	4.200.000.000,00	3.779.485.000,00	89,99	9.094.300.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	481.297.502.589,00	458.448.887.015,83	95,25	356.754.902.359,04
Belanja Modal - Tanah	5.1.2.2.1	276.511.338.316,00	265.771.890.897,00	96,12	61.506.862.123,02
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	115.324.807.779,00	110.121.074.839,69	95,49	236.359.501.621,14
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	62.241.529.223,00	59.374.343.153,60	95,39	128.335.018.713,06
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	21.368.682.995,00	17.984.051.017,54	84,16	117.877.559.353,84
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	5.851.144.276,00	5.197.527.138,00	88,83	10.675.560.548,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	386.445.657.234,68	334.861.356.708,30	87,10	1.182.717.927,18
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	386.445.657.234,68	334.861.356.708,30	87,10	1.182.717.927,18
TRANSFER DAERAH	5.1.3	1.672.926.957.084,45	1.441.398.088.184,18	86,16	2.314.688.305.724,54
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	1.268.007.845.434,45	1.054.748.783.171,60	83,18	1.302.125.715.639,33
Transfer Bagi Hasil Pajak	5.1.3.1.1	1.268.007.845.434,45	1.054.748.783.171,60	83,18	1.302.125.715.639,33
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	404.919.111.050,00	386.649.365.012,58	95,49	812.562.910.085,21
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.2.1	263.272.398.050,00	246.157.706.212,58	93,50	330.210.987.829,21
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.2	136.377.000.000,00	135.221.485.200,00	99,15	479.795.535.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.3	5.269.713.600,00	5.269.713.600,00	100,00	2.506.067.256,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		6.924.582.165.725,65	6.358.121.475.263,61	91,82	6.518.313.866.322,41
SURPLUS/DEFISIT		(831.815.527.448,65)	(639.781.775.648,12)	76,91	127.225.004.847,18
PEMBIAYAAN	5.1.4	831.815.527.448,65	832.637.635.963,48	100,10	704.590.522.601,47
PERERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	831.815.527.448,65	832.637.635.963,48	100,10	704.590.522.601,47
Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	831.815.527.448,65	831.863.803.725,48	100,01	702.345.385.396,47
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		-	774.032.140,00	-	2.245.137.235,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	-	-	-	-
SISA LESIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/ISKPA		-	192.855.860.215,36	-	831.815.527.448,65

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan